

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidak berdayaan yang dialami oleh individu (Pahmi, 2020). Fenomena ini menjadi salah satu permasalahan sosial utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena jika tidak segera diatasi, dapat memicu berbagai persoalan lain seperti meningkatnya angka pengangguran, tindak kriminalitas, serta bertambahnya jumlah masyarakat yang tergolong dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Radya, 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,66% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,67 juta jiwa. Angka ini menurun pada tahun 2019 menjadi 9,22% dengan 24,79 juta jiwa. Namun, pada tahun 2020, kemiskinan meningkat menjadi 10,19% dengan total 27,55 juta jiwa yang tergolong miskin. Lonjakan angka kemiskinan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang tergolong sebagai PMKS. PMKS sendiri terdiri atas 26 kategori, salah satunya adalah gelandangan dan pengemis (gepeng). Keberadaan gepeng kerap dijumpai di kota-kota besar, yang umumnya muncul sebagai konsekuensi negatif dari proses pembangunan, khususnya di wilayah perkotaan. Banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis pada tahun 2019, diperkirakan mencapai 77.500 yang tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia. Jumlah ini diyakini jauh lebih tinggi dibandingkan angka

perkiraan mengingat banyaknya kendala pendataan gelandangan dan pengemis di lapangan.

Gelandangan dan pengemis merupakan bentuk permasalahan sosial yang cukup serius dan masih terjadi di berbagai daerah, baik di kota besar maupun kota kecil. Kondisi ini muncul terutama akibat kemiskinan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Sejumlah faktor mendasar turut memengaruhi meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di wilayah perkotaan, seperti kemiskinan yang terus berlangsung, arus urbanisasi akibat ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya keterampilan tenaga kerja, keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, tingginya angka putus sekolah di tingkat dasar, serta rendahnya semangat kerja. Berbagai faktor tersebut belum tertangani secara efektif, sehingga jumlah gelandangan dan pengemis terus bertambah dan menjadi wujud nyata dari kemiskinan sebagai fenomena sosial.

Di Indonesia, keberadaan gelandangan dan pengemis di kota-kota besar merupakan gejala sosial yang muncul akibat berbagai faktor kompleks, dengan persoalan ekonomi sebagai penyebab utama. Terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi pemicu dominan. Secara umum, faktor penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal (subjektif) dan eksternal (objektif). Faktor subjektif berkaitan dengan kepribadian, seperti sikap pasrah terhadap keadaan, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, dan rendahnya kualitas SDM. Sementara faktor objektif mencakup kondisi-kondisi eksternal yang mendorong seseorang untuk menjadi gelandangan atau pengemis. Meski demikian, ada pula individu yang menjadikan aktivitas mengemis atau hidup

menggelandang sebagai pilihan profesi karena kemudahan dalam memperoleh uang tanpa banyak usaha. Fenomena inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam proses pembangunan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 mengenai Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan merupakan individu yang menjalani hidup tidak sesuai dengan standar kelayakan yang berlaku di masyarakat, tidak memiliki tempat tinggal tetap, serta tidak memiliki pekerjaan yang jelas di suatu wilayah, dan hidup berpindah-pindah di ruang publik. Sedangkan pengemis didefinisikan sebagai individu yang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum, menggunakan berbagai cara dan alasan untuk membangkitkan rasa iba dari orang lain. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sastraatmadja yang menyatakan bahwa gelandangan merupakan sekelompok masyarakat yang terasing dan sering dijumpai dalam kondisi yang tidak lazim, seperti tinggal di kolong jembatan, lorong-lorong sempit, rel kereta api, atau emperan toko. Dalam kehidupannya, mereka terlihat sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kehidupan lebih layak. Dengan demikian, gelandangan dapat dimaknai sebagai individu yang hidup dalam kondisi menyimpang dari norma kehidupan yang layak, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap, serta hidup menggelandang di ruang-ruang publik. Adapun menurut Kuntari dan Hikmawati (2017), pengemis adalah individu yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum melalui berbagai metode dan alasan, semata-mata untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Fadri (2019), dalam perspektif teori struktural-fungsionalis, gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari komunitas kelas pinggiran atau marginal (secara ekonomi) dalam struktur sosial masyarakat. Mereka secara sadar maupun tidak sadar berusaha mengaktualisasikan keberadaan komunitasnya melalui aktivitas di dunia informal sebagai bentuk ketahanan terhadap sektor pembangunan yang cenderung berpihak pada sektor formal. Namun secara substansial, Setiawan (2020) menyatakan bahwa gelandangan dan pengemis adalah representasi dari kelompok masyarakat yang sangat rentan secara ekonomi karena berada dalam kondisi sub-marginal. Kerentanan ini disebabkan oleh terbatasnya kualitas kemampuan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kapasitas yang dimiliki, sehingga mereka tidak mampu bersaing dalam sektor formal. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis tidak lepas dari faktor kemiskinan baik yang bersifat kultural maupun struktural.

Kehadiran gelandangan dan pengemis telah menjadi masalah sosial yang kerap dianggap mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Mereka sering dipersepsikan secara negatif karena dianggap merusak keindahan, kesusilaan, kebersihan, dan ketertiban umum. Kuntari dan Himawati (2017) berpendapat bahwa permasalahan utama dari gelandangan dan pengemis lebih bersifat sosial-budaya, yakni ketidakmampuan mereka dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga mengakibatkan keterpinggiran dan pengucilan. Selain itu, menurut Salamah (2004), kehadiran gelandangan dan pengemis sering dikaitkan dengan masalah sosial lain seperti

pengangguran, tindak kriminal (pencurian, penjambretan), perjudian, konsumsi alkohol, dan prostitusi.

Melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, penanganan terhadap gelandangan dan pengemis membutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga masyarakat umum. Pemerintah sendiri telah melaksanakan sejumlah langkah, seperti menyediakan tempat tinggal yang layak, melakukan pemberdayaan secara sosial dan ekonomi, memberikan bantuan sosial, serta merujuk individu ke lembaga sosial. Secara garis besar, penanganan terhadap gelandangan dan pengemis terbagi menjadi dua bentuk, yakni penanganan yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Penanganan terstruktur merujuk pada upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh instansi pemerintah, baik melalui pendekatan berbasis panti maupun pendekatan di luar panti sosial. Sistem panti sosial melibatkan proses penjemputan oleh aparat (Dinas Sosial dan Satpol PP), penyerahan ke panti sosial, serta proses pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, dan terminasi. Penanganan tidak terorganisir, yaitu bantuan atau upaya yang bersifat spontan dan tidak berkesinambungan, biasanya dilakukan oleh individu atau komunitas secara sukarela tanpa koordinasi dengan pihak berwenang.

Berikut Populasi Gelandangan dan Pengemis yang berada di Provinsi Jawa Timur :

Tabel 1.1 Data Gelandangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	GELANDANGAN DAN GELANDANGAN PSIKOTIK			
		L	P	W	Jumlah
1	Pacitan	15	13		28
2	Ponorogo	55	52		107
3	Trenggalek	9	-		9
4	Tuluagung	5	5		10
5	Blitar	64	36		100
6	Kediri	40	33		73
7	Malang	78	41		119
8	Lumajang	3	2		5
9	Jember	155	115		270
10	Banyuwangi	1	-		1
11	Bondowoso	-	-		-
12	Situbondo	67	39		106
13	Probolinggo	56	22		75
14	Pasuruan	48	11		59
15	Sidoarjo	27	16		43
16	Mojokerto	38	18		56
17	Jombang	44	20		64
18	Nganjuk	38	20		58
19	Madiun	47	37		84
20	Magetan	8	18		26
21	Ngawi	1	2		3
22	Bojonegoro	14	5		19
23	Tuban	38	28		66
24	Lamongan	3	5		8
25	Gresik	19	26		45
26	Bangkalan	2	-		2
27	Sampang	9	1		10
28	Pamekasan	2	7		9
29	Sumenep	5	5		10
30	Kota Kediri	3	7		10
31	Kota Blitar	1	2		3
32	Kota Malang	6	10		16
33	Kota Probolinggo	-	-		-
34	Kota Pasuruan	1	4		5
35	Kota Mojokerto	1	1		2
36	Kota Madiun	3	1		4
37	Kota Surabaya	1,520	350		1,870
38	Kota Batu	-	-		-
	<b>Jumlah</b>	<b>2,426</b>	<b>952</b>		<b>3,378</b>

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.2 Data Pengemis Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENGEMIS			
		L	P	W	Jumlah
1	Pacitan	1	3		4
2	Ponorogo	83	62		145
3	Trenggalek	45	21		66
4	Tuluagung	12	18		30
5	Blitar	46	45		91
6	Kediri	5	8		13
7	Malang	115	98		213
8	Lumajang	78	15		93
9	Jember	200	143		343
10	Banyuwangi	5	5		10
11	Bondowoso	34	64		98
12	Situbondo	23	22		45
13	Probolinggo	43	30		73
14	Pasuruan	18	8		26
15	Sidoarjo	41	82		123
16	Mojokerto	52	18		98
17	Jombang	53	15		68
18	Nganjuk	38	27		65
19	Madiun	0	124		124
20	Magetan	2	3		5
21	Ngawi	2	0		2
22	Bojonegoro	71	72		143
23	Tuban	82	107		189
24	Lamongan	3	6		9
25	Gresik	165	111		276
26	Bangkalan	3	0		3
27	Sampang	0	0		-
28	Pamekasan	0	0		-
29	Sumenep	75	31		106
30	Kota Kediri	3	4		7
31	Kota Blitar	2	1		3
32	Kota Malang	66	85		151
33	Kota Probolinggo	55	37		92
34	Kota Pasuruan	27	44		71
35	Kota Mojokerto	19	37		56
36	Kota Madiun	11	20		31
37	Kota Surabaya	32	21		53
38	Kota Batu	-	7		7
	<b>Jumlah</b>	<b>1,510</b>	<b>1,422</b>		<b>2,932</b>

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Populasi Gelandangan dan Pengemis yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022

terdapat Gelandangan dan Gelandangan psikotik sebanyak 3.378 (Tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan ) jiwa dan Pengemis sebanyak 2.932 (Dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua ) jiwa yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota.

Cara mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Timur, dipastikan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sidoarjo sebagai upaya yang melayani Penerima Manfaat (PM) melalui Program Bimbingan Sosial.

Program bimbingan sosial adalah layanan yang membantu seseorang mengatasi masalah sosial dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial. Program ini dapat diberikan kepada individu atau kelompok. Program Bimbingan Sosial untuk gelandangan dan pengemis dapat berupa bimbingan konseling dan pelatihan keterampilan.

Penelitian terdahulu menjadi salah satu landasan penting dalam menyusun penelitian ini. Selain berfungsi sebagai acuan, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melihat kesamaan maupun perbedaan pendekatan, variabel, dan temuan yang dihasilkan. Lebih lanjut, penelitian-penelitian tersebut memperkaya kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis fenomena yang diteliti oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa studi sebelumnya yang membahas mengenai variabel gelandangan dan pengemis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Sri Waluyo, 2002. Proses Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis : Studi kasus di Panti Sosial Bina karya “Pangudi Luhur” Bekasi. Universitas

Indonesia. Sri Waluyo menyimpulkan bahwa rehabilitasi sosial di PSBK Pangudi Luhur Bekasi memiliki peran penting dalam membina dan memandirikan gepeng, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan mental peserta, dukungan sistem pasca-rehabilitasi, dan keterpaduan antar lembaga. Diperlukan penguatan program berkelanjutan dan advokasi sosial agar gepeng benar-benar dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan kemiskinan.

Adi Saputro, 2011. Pengaruh Persepsi tentang Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) terhadap Pengambilan Keputusan Memberi Uang kepada Gepeng. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasil penelitian dengan deskriptif korelasi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat sangat mempengaruhi keputusan untuk memberi uang kepada gepeng, dan persepsi ini dibentuk oleh berbagai faktor sosial, emosional, dan kognitif. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat perlu didukung dengan perubahan persepsi melalui edukasi dan kampanye yang tepat sasaran, bukan hanya melalui pendekatan larangan atau penertiban.

Citra Destianti. 2016. Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri pada Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi. Universitas Bhayangkara Jakarta.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah dukungan sosial memiliki peran penting dalam membantu gepeng menyesuaikan diri di lingkungan rehabilitasi, khususnya di PSBK Pangudi Luhur Bekasi. Maka dari itu, untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan, perlu penguatan kualitas relasi sosial dan dukungan yang berkelanjutan dari petugas sosial, sesama penghuni, serta lingkungan sekitar.

Adinda Saraswati, 2018 “Pemberdayaan gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya rehabilitasi Sosial melalui Program Desaku Menanti”. Universitas Brawijaya Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Saraswati (2018) menunjukkan bahwa program "Desaku Menanti" merupakan bentuk rehabilitasi sosial yang efektif berbasis pemberdayaan, karena mampu menyentuh aspek mental, sosial, dan ekonomi gepeng secara menyeluruh. Namun, keberhasilan program sangat tergantung pada komitmen peserta, kesinambungan pendampingan, dan dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan jangka panjang dan integrasi program pemberdayaan sosial agar hasilnya berkelanjutan.

Mira Rahmawati, 2023 “Efektifitas Tindakan Dinas Sosial dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bogor. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Rahmawati (2023) menyimpulkan bahwa tindakan Dinas Sosial Kabupaten Bogor dalam menanggulangi gepeng belum efektif secara menyeluruh. Program yang ada belum menyentuh akar permasalahan, masih bersifat sementara, dan tidak menjamin keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan ekonomi serta sosial, dengan melibatkan berbagai pihak secara sinergis.

Penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa program pembinaan dan rehabilitasi sosial belum optimal. Banyak gepeng yang kembali ke jalan karena kurangnya keberlanjutan program, tidak adanya jaminan ekonomi pascarehabilitasi, program yang tidak berbasis pada kebutuhan dan karakteristik

gepeng. Adi Saputro (2011) dan Adinda Saraswati (2018) menekankan perlunya pendekatan multi-stakeholder dan pemberdayaan ekonomi yang kontekstual.

Solusi yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pendekatan holistik dan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan keterampilan, pelatihan kerja, dan pendampingan sosial, pentingnya melibatkan komunitas lokal, LSM, CSR, dan sektor swasta untuk memperluas intervensi. Mira Rahmawati (2013) menekankan perlunya pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial sebagai bagian dari rehabilitasi mental dan sosial gepeng.

Para peneliti menyepakati bahwa penanganan gepeng tidak cukup hanya dengan penertiban atau razia, tetapi harus melalui program jangka panjang yang humanis, partisipatif, dan berbasis pada penguatan kapasitas individu. Upaya ini harus terintegrasi dengan kebijakan sosial, pembangunan ekonomi inklusif, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. GAP Penelitian terdahulu dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. GAP Teoritis

Meskipun Mira Rahmawati (2013) menekankan pentingnya pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial dalam rehabilitasi gepeng, secara teoritis masih belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kerangka teori pendidikan karakter dengan teori pemberdayaan sosial dan ekonomi secara terpadu. Teori-teori intervensi sosial yang ada sering memisahkan antara aspek rehabilitasi mental (karakter) dan aspek pemberdayaan ekonomi (keterampilan kerja), sehingga diperlukan pengembangan kajian teoritis yang menghubungkan keduanya dalam satu model yang holistik.

## 2. GAP Konseptual

Konsep penanganan gepeng selama ini cenderung bersifat parsial, terfokus pada bantuan sosial jangka pendek tanpa adanya model konseptual yang mengintegrasikan berbagai elemen penting seperti pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, pendampingan sosial, serta kolaborasi multipihak (komunitas lokal, LSM, CSR, dan sektor swasta). Masih terdapat kekosongan dalam rancangan model intervensi berbasis pendekatan holistik yang mendukung keberlanjutan proses rehabilitasi gepeng secara sistematis.

## 3. GAP Kontekstual

Dalam konteks Indonesia, khususnya di daerah perkotaan dengan tingkat urbanisasi tinggi, studi yang secara mendalam mengkaji penerapan model pemberdayaan gepeng berbasis kolaborasi multipihak masih terbatas. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial-budaya dan ekonomi yang unik, sehingga dibutuhkan penelitian kontekstual yang menyesuaikan model intervensi dengan kondisi spesifik wilayah, termasuk potensi peran komunitas lokal, LSM, CSR, dan sektor swasta dalam intervensi sosial tersebut.

## 4. GAP Praktis

Di lapangan, implementasi program pemberdayaan gepeng sering kali mengalami kendala dalam hal kesinambungan dan kolaborasi lintas sektor. Banyak program yang belum mampu memberikan dampak jangka panjang karena lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, minimnya pendampingan sosial pasca-pelatihan, serta belum terbangunnya pola sinergi yang kuat dengan sektor swasta (CSR). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang fokus pada pengembangan

strategi praktis untuk mengoptimalkan pelibatan multipihak dalam program pemberdayaan gepeng secara berkelanjutan.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan program bimbingan sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Sidoarjo?”.

Untuk penjelasan lebih rinci tentang fokus masalah penelitian ini, maka peneliti menjabarkan rumusan masalah tersebut dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Jenis-Jenis Bimbingan Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo?
2. Bagaimana Tahap-Tahap Bimbingan Sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo?
3. Bagaimana hasil Bimbingan Sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Sosial bagi gelandangan dan pengemis di. Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang ”Program Bimbingan Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo ” bertujuan untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan mendeskripsikan tentang :

1. Jenis-Jenis Bimbingan Sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo.
2. Tahap-Tahap Bimbingan Sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo.
3. Hasil Bimbingan Sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo.
4. Faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Sosial bagi gelandangan dan pengemis di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dengan kondisi nyata di lapangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta referensi bacaan bagi berbagai pihak. Temuan-temuan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber awal untuk memperdalam pemahaman terkait isu dan upaya penanganan terhadap gelandangan dan pengemis.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis.
2. Dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat khususnya bagi Dinas Sosial dan instansi terkait, serta mendorong masyarakat umum untuk lebih memperhatikan gelandangan dan pengemis karena merupakan tanggung jawab bersama.

### 1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Penelitian ini disusun menggunakan tatacara dan sistematika penulisan berdasarkan pedoman penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu, dan teori yang relevan dengan penelitian.
- BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, dan proses dan jadwal penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil dari rumusan masalah yang diajukan, serta pembahasan yang mencakup analisa hasil penelitian, analisa masalah, analisa kebutuhan dan analisa sumber.

**BAB V**      **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana, metode dan teknik, tahapan program dan kegiatan yang dilakukan, tempat dan waktu pelaksanaan, rencana anggaran biaya, indikator keberhasilan, analisis kelayakan program.

**BAB VI**      **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan hasil penelitian dan saran terkait dengan implementasi program.